

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP WAJIB SIMPAN RAHASIA
KEDOKTERAN ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA)
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**



**Heru Iskandar
NIM : 1410112003**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2018**

PENGESAHAN

KAJIAN YURIDIS TERHADAP WAJIB SIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN
ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA) BERDASARKAN
PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KABUPATEN
JEMBER

Diterima dan telah diuji oleh tim penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 3 Agustus 2018

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,

H. Suyatna, S.H., M.Hum.
Ketua

Drs. Sulistyono, Msi
Sekretaris

H. Sulistio Adiwianto, S.H., M.H.
Anggota

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

H. Suyatna, S.H., M.Hum.
NPK : 8809225

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Wajib Simpan Rahasia Kedokteran Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jember”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Pada tulisan ini disajikan pokok bahasan mengenai ketentuan wajib simpan rahasia kedokteran yang berlaku di Indonesia saat ini khususnya pada penderita HIV dan AIDS.

Penulis menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, maka dirasakan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan tulisan ini. Besar harapan penulis agar tulisan ini dapat bermanfaat dan dipergunakan oleh pihak yang membutuhkan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing dan semua pihak yang telah membantu terwujudnya tulisan ini.

Jember, 4 Agustus 2018

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	4
1.3 Definisi Operasional	5
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian	8
1.6.1 Metode Pendekatan	9
1.6.2 Jenis Penelitian	10
1.6.3 Sumber Data	10
1.6.4 Teknik Pengambilan Data	13
1.6.5 Tempat Penelitian ..	13
1.6.6 Teknik dan Prosedur Analisis Data	13

II.	KAJIAN TEORI	15
2.1	Wajib Simpan Rahasia Kedokteran	15
2.2	Perlindungan Negara terhadap Hak Asasi Manusia	17
2.3	Perbuatan Melawan Hukum	19
2.4	Penafsiran Hukum	21
2.5	Kebijakan penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Jember	23
2.6	Karakteristik Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Berprespektif Hak Asasi Manusia	27
III.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	Ketentuan Wajib Simpan Rahasia Kedokteran Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jember	32
IV.	PENUTUP	62
4.1	Kesimpulan	62
4.2	Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul	
1	Peraturan Menteri Kesehatan 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS	65
2	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Timur	96
3	Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jember	109

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- A.A. Oka Mahendra, 2017. *Pedoman Praktis Legal Drafting: Panduan Praktis Merancang Peraturan Perundang-undangan Secara Jelas dan Efektif*, Malang: Setara Press.
- Bambang Sunggono, 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cecep Triwibowo, 2014. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika
- Nukila Evanty dan Nurul Ghufron, 2014. *Paham Peraturan Daerah (PERDA) Berperspektif HAM (Hak Asasi Manusia)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana edisi revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2013. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis disertai Manual): Konsepsi Teoritis menuju Artikulasi Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 2008. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Muladi (editor), 2009. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Muntaha, 2017. *Hukum Pidana Malapraktik: Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sudigdo Mertokusumo, 2008. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Titon Slamet Kurnia, 2015. *Interpretasi Hak-hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia The Jimly Court 2003-2008*, Bandung: Mandar Maju.

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Dasar RI 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter .

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80/2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Timur.

Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jember.

Internet dan lain-lain

Khairon I., 2017. *Para Pengidap HIV Aids di Jember Didominasi Ibu Rumah*

Tangga. Suara Jatim Post,

<http://m.suarajatimpost.com/read/4264/20170126/125733/para-pengidap-hiv-aids-di-jember-didominasi-ibu-rumah-tangga/>.

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), 2017. *Strategi dan Program*.

<http://www.aidsindonesia.or.id/contents/13/69/Strategi-dan-Program-#sthash.mJZmW1G.dpbs>.

- Laporan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit KEMENKES, RI. Mei 2017. *Laporan Perkembangan HIV-AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual Triwulan IV Tahun 2016*.
http://siha.depkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_HIV_AIDS_TW_1_2_017_rev.pdf
- Laporan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit KEMENKES, RI. Juni 2018. *Laporan Perkembangan HIV-AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual Triwulan I Tahun 2018*
http://siha.depkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_HIV_AIDS_TW_1_2_018_OK.pdf
- Pusat Data dan Informasi KEMENKES RI, 2016. *Situasi Penyakit HIV AIDS di Indonesia*, Jakarta: Kemenkes RI,
<http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin%20hive%20aids.pdf>
- Wirawan, O. A. 2017. *Dinkes Jember Tolak Usulan Buka Identitas Pasien HIV/AIDS*. BeritaJatim.com.
http://beritajatim.com/pendidikan_kesehatan/288909/dinkes_jember_tolak_usulan_buka_identitas_pasien_hiv/aids.html.